

BAB I

PENDAHULUAN

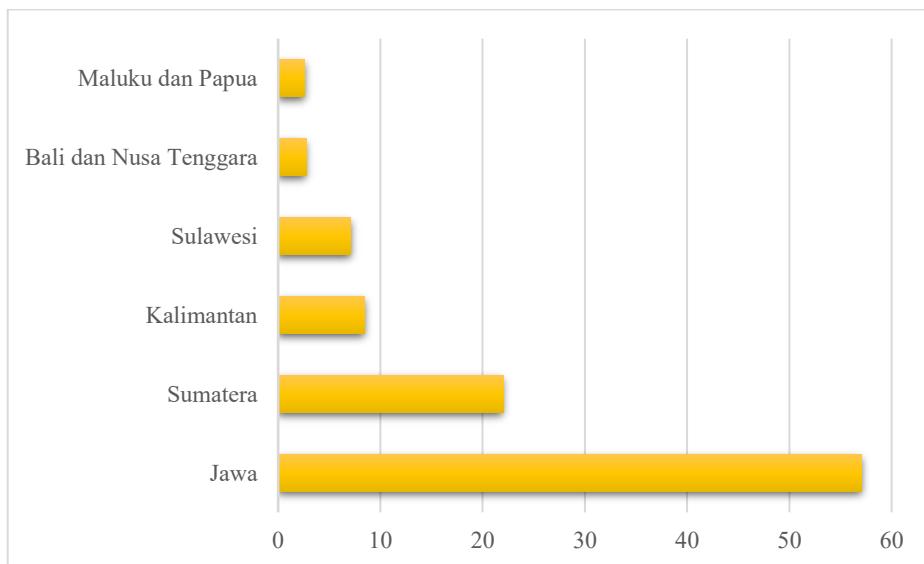
1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai gambaran dimana perekonomian suatu negara mengalami peningkatan hingga mencapai taraf kemakmuran yang tinggi (Rahmawati et al., 2024).

Menurut North (1990) dalam bukunya “*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*” pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti investasi asing atau perubahan pasar global, tetapi juga oleh faktor internal seperti inovasi, kebijakan publik, serta stabilitas politik dan sosial. Selain itu, teori ekonomi kelembagaan menegaskan bahwa kualitas institusi, termasuk institusi demokrasi, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas fiskal, dan penyediaan layanan publik yang efektif (Martha et al., 2015). Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut direpresentasikan melalui variabel Indeks Demokrasi Indonesia sebagai indikator stabilitas politik, Upah Minimum Provinsi sebagai representasi kebijakan publik, serta jumlah tenaga kerja sebagai komponen utama inovasi dan produktivitas.

Salah satu indikator untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu berdasarkan produk dan jasa yang dibentuk oleh masyarakat suatu

wilayah yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingginya nilai PDRB mencerminkan pesatnya pertumbuhan ekonomi, dan dapat dikatakan perekonomian daerah mengalami kemajuan (Hannyfah et al., 2023).

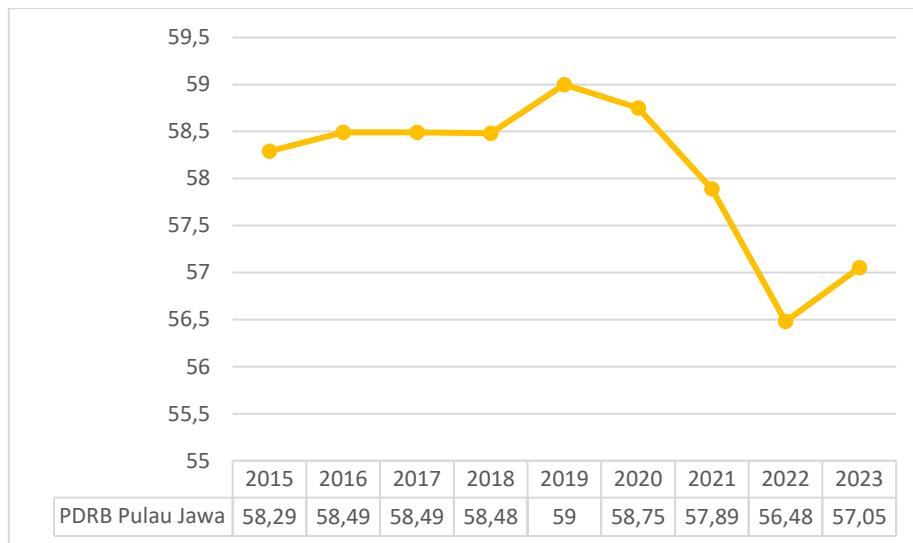


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1.1
Kontribusi PDRB Berdasarkan Pulau Utama di Indonesia
terhadap PDB Nasional Tahun 2023 (Persen)**

Gambar 1.1 menunjukkan data kontribusi Produk Domestik Bruto berdasarkan pulau utama di Indonesia pada tahun 2023. Pulau Jawa menjadi penyumbang pendapatan perkapita terbesar dengan kontribusi sebesar 57,05%. Sebagai salah satu dari enam pulau utama di Indonesia, Pulau Jawa terletak di wilayah tengah-barat Nusantara dengan luas sekitar 128.297 km². Pulau ini memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, Pulau Jawa menjadi pusat utama aktivitas konsumsi, produksi, dan perdagangan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Purnamasari, 2024). Hingga saat ini pembangunan industri, perdagangan, dan jasa di Indonesia masih bergantung pada Pulau Jawa, menjadikan

sebagai pusat perekonomian nasional (Sarifah, 2024).



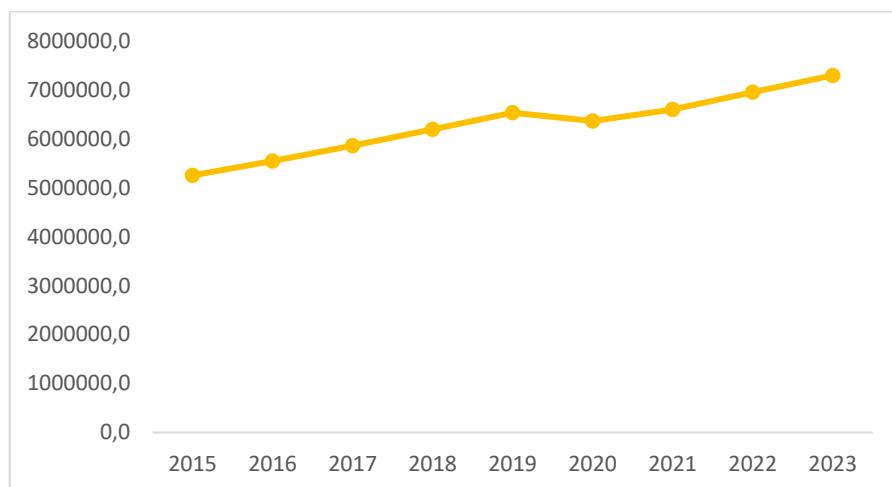
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1.2
Kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDB Nasional (Persen)**

Gambar 1.2 menunjukkan tren kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia pada periode 2015–2023. Berdasarkan data yang ditampilkan, kontribusi PDRB Pulau Jawa mengalami kecenderungan stabil pada tahun 2015 hingga 2018, dengan angka berkisar antara 58,29% hingga 58,49%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019, di mana kontribusinya mencapai 59%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Namun, sejak tahun 2020, kontribusi PDRB Pulau Jawa mengalami penurunan bertahap, yang diduga berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2022, ketika kontribusi PDRB menurun hingga 56,48%, sebelum menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 57,05% pada tahun 2023.

Penurunan kontribusi PDRB Pulau Jawa dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian nasional.

Meskipun Pulau Jawa tetap menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, tren penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pemulihan pada tahun 2023 menunjukkan adanya potensi perbaikan, namun masih perlu dikaji lebih lanjut apakah tren ini akan terus meningkat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kontribusi PDRB Pulau Jawa diperlukan guna memberikan gambaran yang lebih jelas bagi perumusan kebijakan ekonomi ke depan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.3

Perkembangan Jumlah PDRB Pulau Jawa Tahun 2015-2023 (Miliar Rupiah)

Dalam gambar 1.3 menunjukkan perkembangan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015-2023. Jika ditinjau dari data yang disajikan, PDRB Pulau Jawa mengalami peningkatan secara konsisten sepanjang periode tersebut. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di wilayah Pulau Jawa. Namun, terdapat perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020, yang diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian.

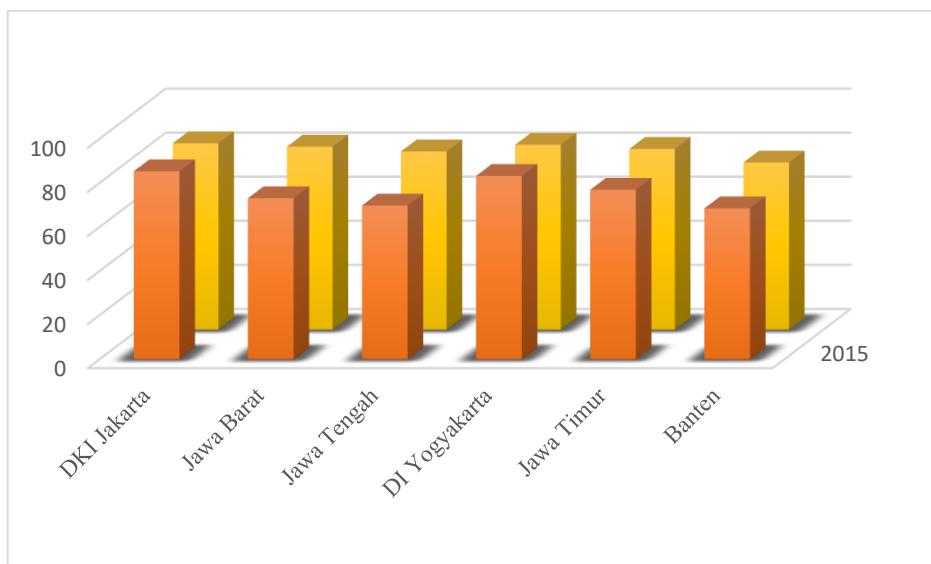
Meskipun demikian, setelah tahun 2020, tren pertumbuhan kembali menunjukkan peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Pulau Jawa tetap menjadi pusat utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mankiw (2000) dan Blanchard (2006) dalam penelitian Adib et al., (2019) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Institusi akan berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan politik sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya modal, tenaga kerja, pendapatan, investasi, dan lainnya. Namun, dari banyaknya faktor yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu negara dan daerah masih sangat minim penelitian yang menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Tavares dan Wacziarg (2001) dalam penelitian Ifan et al., (2024) hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan berbagai argumen. Di mana, beberapa argumen menunjukkan bahwa demokrasi dan pertumbuhan memiliki hubungan positif yang artinya semakin kuatnya sistem demokrasi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen pengukuran kualitas demokrasi di tingkat provinsi memberikan gambaran tentang bagaimana kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi dapat mempengaruhi dinamika ekonomi suatu

wilayah (Badan Pusat Statistik, 2020).

IDI mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, transparansi pemerintahan, serta efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan. Dalam konteks ekonomi, demokrasi yang stabil dan berkualitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional (Purba & Hariyadi, 2023). Dalam sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki karakteristik institusional yang baik, yang diukur menggunakan kebebasan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah efisiensi peradilan, pemerintah yang efektif dan perlindungan terhadap properti (Adib et al., 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.4

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015 dan 2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di enam provinsi Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, pada tahun 2015 dan 2023.

Grafik ini menggambarkan perubahan tingkat demokrasi di setiap provinsi dalam kurun waktu delapan tahun. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan IDI di seluruh provinsi, yang ditunjukkan oleh perbedaan tinggi batang antara kedua tahun tersebut. DI Yogyakarta dan DKI Jakarta tetap memiliki tingkat demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, sementara Jawa Barat dan Banten menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan. Peningkatan IDI ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kebebasan sipil, hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi di Pulau Jawa. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, serta penguatan institusi demokrasi kemungkinan berkontribusi terhadap tren positif ini. Namun, masih terdapat perbedaan antar provinsi, yang mengindikasikan bahwa perkembangan demokrasi di Pulau Jawa belum merata dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Adib et al., (2019), Ifan et al., (2024), dan Saputra et al., (2024) menunjukkan hasil bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hutasoit et al., (2024), Sabardin & Muhammad Ghafur Wibowo (2024), dan Paradipta (2019) menunjukkan hasil bahwa Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Upah Minimum Provinsi menjadi salah satu indikator bagi kesejahteraan penduduk. Salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi suatu daerah yaitu dengan pembentukan kebijakan upah minimum (Ahmadi, 2024). Sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023, bahwa upah

merupakan hal yang diterima dalam sebagai imbalan dari pemberi kerja. Gubernur sebagai kepala tertinggi sebuah daerah akan membentuk sebuah batasan upah minimum dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Kenaikan upah minimum ini akan mampu meningkatkan daya beli pekerja serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Putri, 2022).

Berikut ini, perbandingan besarnya upah minimum provinsi menurut enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 dan 2023 disajikan pada gambar 1.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

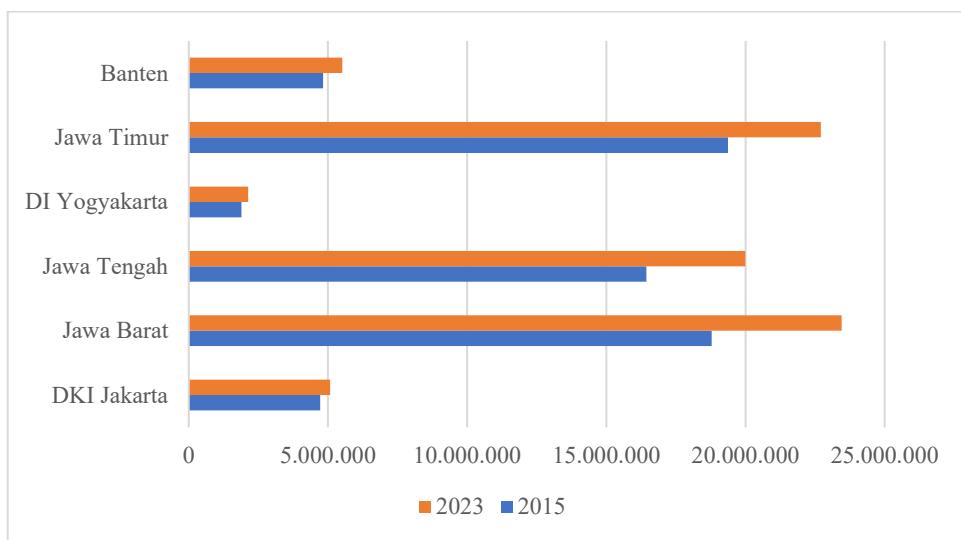
**Gambar 1.5
Perbandingan Upah Minimum Provinsi di Enam Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015 dan 2023 (Rupiah)**

Gambar 1.5 menunjukkan perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015 dan 2023. Secara umum, terjadi peningkatan UMP di seluruh provinsi selama periode tersebut. Provinsi DKI Jakarta secara konsisten memiliki UMP tertinggi, yaitu sekitar Rp2.700.000 pada tahun 2015 dan meningkat tajam menjadi Rp4.910.798 pada tahun 2023. Sementara itu, provinsi dengan UMP terendah tetap ditempati oleh DI Yogyakarta, meskipun

mengalami kenaikan dari sekitar Rp910.000 pada tahun 2015 menjadi Rp1.958.170 pada tahun 2023. Provinsi Banten menunjukkan peningkatan signifikan, dengan UMP yang hampir menyamai DKI Jakarta pada tahun 2023, yaitu Rp2.661.280 Peningkatan UMP yang merata di seluruh wilayah Pulau Jawa ini mencerminkan adanya kebijakan penyesuaian upah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setiap tahunnya. Meski demikian, ketimpangan antar provinsi masih cukup terlihat, yang dapat mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup di masing-masing wilayah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah & Hasbiullah (2023), Luh et al., (2019), Rabbani & Hasmarini (2024), dan Adib et al., (2019) juga menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu elemen penting untuk memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki kualitas hidup yang baik maka dibuktikan dengan upah minimum regional.

Selain faktor upah minimum provinsi, tenaga kerja juga merupakan faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan tujuan kedelapan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (Fu’ad, 2024). Tenaga kerja mengacu pada seseorang yang dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi tingkat pendapatan nasional baik dari segi jumlah atau kuantitas (Hatta et al., 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik, (data diolah)

Gambar 1.6
Jumlah Tenaga Kerja di Enam Provinsi Pulau Jawa (Jiwa)

Gambar 1.6 menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja di enam provinsi Pulau Jawa tahun 2015 dan 2023. Jawa Barat memiliki jumlah tenaga kerja terbesar, yaitu 18,79 juta jiwa pada tahun 2015 yang meningkat menjadi 23,45 juta jiwa pada tahun 2023, diikuti oleh Jawa Timur yang tumbuh dari 19,36 juta menjadi 22,70 juta jiwa. Jawa Tengah juga mengalami peningkatan signifikan dari 16,43 juta menjadi 19,98 juta jiwa, sementara DI Yogyakarta bertambah dari 1,89 juta menjadi 2,13 juta jiwa. DKI Jakarta dan Banten masing-masing menunjukkan kenaikan dari 4,72 juta menjadi 5,07 juta jiwa serta dari 4,82 juta menjadi 5,51 juta jiwa. Peningkatan ini mencerminkan potensi kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB di Pulau Jawa selama periode tersebut.

Menurut Todaro (2000) dalam penelitian Fu'ad, (2024), tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga produktif, sehingga apabila kuantitas tenaga kerja meningkat, maka hasil produksi akan meningkat pula. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Syaputra et al., (2024) bahwa tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Solow yang dikemukakan oleh ekonom Robert Solow, perkembangan pertumbuhan ekonomi jangka panjang bergantung pada perkembangan faktor produksi, termasuk pekerja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Luh et al., (2019) bahwa tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Analisis Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Pulau Jawa Tahun 2015-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja secara parsial terhadap PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2015-2023?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja secara simultan terhadap PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis serta mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja secara parsial terhadap PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2015-2023.
2. Menganalisis serta mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja secara simultan terhadap PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2015-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi kontribusi serta acuan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah terkait dalam hal membuat suatu kebijakan atau pembangunan yang lebih baik kedepannya. Diharapkan pula dapat meningkatkan produk domestik regional bruto di Pulau Jawa diantaranya daerah Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi civitas akademika terkait pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja secara parsial terhadap PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2015-2023. Diharapkan pula sebagai bahan literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa maupun berhubungan.

1.5 Lokasi dan Waktu

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di enam provinsi Pulau Jawa diantaranya terdiri dari daerah Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari 2025 dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Adapun rencana kegiatan penelitian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian